



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



KETERBUKAAN BUDAYA LOKAL DALAM AKUNTABILITAS KEUANGAN GEREJA KRISTEN

Jannes Samuel Elfronzo Abhimaël Panggabean, Ignatius Novianto Hariwibowo

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No.44, Yogyakarta 55281

Surel: novianto.wibowo@uajy.ac.id

Volume 12
Nomor 3
Halaman 601-619
Malang, Desember 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
26 Agustus 2021
Tanggal Revisi:
09 Desember 2021
Tanggal Diterima:
31 Desember 2021

Kata kunci:

akuntabilitas,
gereja,
gotong royong,
keterbukaan

Mengutip ini sebagai:

Panggabean, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan Budaya Lokal dalam Akuntabilitas Keuangan Gereja Kristen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 601-619. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.34>

Abstrak - Keterbukaan Budaya Lokal dalam Akuntabilitas Keuangan Gereja Kristen

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk mengungkap peran budaya lokal dalam penerapan akuntabilitas keuangan di gereja Kristen.

Metode - Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif disiplin. Beberapa pengurus gereja lokal di Pontianak adalah informan pada penelitian ini.

Temuan Utama - Budaya lokal berperan dalam memberikan ruang terhadap kolaborasi dan keterbukaan. Hal ini terlihat melalui praktik nilai gotong royong dan keterbukaan dalam rapat. Tradisi ini membentuk motivasi, nilai manajerial, dan budaya organisasi, yang berperan penting dalam penerapan akuntabilitas keuangan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Prinsip dan nilai-nilai tradisi merupakan dasar yang lebih kuat untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dibandingkan standar akuntansi atau ketentuan akuntabilitas keuangan secara formal. Kesadaran praktik profesionalitas sebagai wujud iman perlu diperkuat oleh organisasi keagamaan.

Kebaruan Penelitian - Hasil penelitian ini mengungkap peran nilai budaya lokal organisasi dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan pada organisasi keagamaan.

Abstract - Local Cultural Transparency in Financial Accountability of the Christian Church

Main Purpose - This study seeks to reveal the role of local culture in implementing financial accountability in Christian churches.

Method - This research uses a disciplinary comparative case study approach. Several local church administrators in Pontianak were informants in this study.

Main Findings - Local culture plays a role in providing space for collaboration and openness. This space can be seen through the practice of the value of mutual association and transparency in meetings. This tradition shapes motivation, organizational values, and organizational culture, which play an essential role in implementing financial accountability.

Theory and Practical Implications - Traditional principles and values are more substantial for realizing financial accountability than accounting standards or formal financial accountability provisions. Awareness of professional practice as a form of faith needs to be strengthened by religious organizations.

Novelty - The results of this study reveal the role of local organizational cultural values in realizing financial accountability in religious organizations.



Sebagai sebuah organisasi nonprofit, gereja memiliki kewajiban untuk mengelola sumber dayanya demi mencapai tujuan dan pelayanan (Purbiyati & Setyawati, 2020), termasuk sumber daya keuangan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa gereja juga perlu mengelola sumber daya secara akuntabel. Terlebih dengan adanya pemangku kepentingan yang menuntut transparansi, objektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari sumbangan umat dalam organisasi gereja. Berdasarkan nilai-nilai religiusitas yang dimiliki gereja, seharusnya terdapat dasar etika yang kuat untuk menerapkan akuntabilitas terhadap dana umat. Selain itu, hadirnya semangat akulturasi budaya lokal yang dianut dalam organisasi gereja menambah nilai unik dalam praktik pengendalian sumber daya umat yang ada. Sebagai tuntutan nilai-nilai kebaikan yang identik dengan organisasi keagamaan, gereja wajib mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan organisasi keagamaan dengan sebaik mungkin. Implikasinya, pelaksanaan proses akuntansi dalam organisasi gereja merupakan suatu yang penting dalam konteks perkembangan umat yang semakin pesat, termasuk perkembangan berbagai aktivitas keuangannya (McPhail & Cordery, 2019). Dalam hal ini, praktik akuntansi yang sarat akan standar formal akan dihadapkan tradisi dan nilai-nilai organisasi gereja yang kompleks. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan gereja.

Mewujudkan akuntabilitas keuangan dalam organisasi keagamaan bukanlah hal yang mudah. Organisasi keagamaan gereja secara khusus dihadapkan pada dualisme nilai, yaitu: sakral dan sekuler (Bigoni et al., 2013; Senander, 2017). Nilai sakral merupakan nilai yang mengarahkan gereja pada tempat peribadatan, sehingga sumber daya keuangan merupakan bagian dari persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian tidak ada keharusan untuk mempertanggungjawabkan kepada manusia. Dalam nilai ini, akuntabilitas keuangan dipandang sebagai aktivitas sekuler sehingga dianggap kurang tepat untuk diterapkan di gereja yang merupakan lembaga keagamaan sakral (Ryandono & Wijayanti, 2019; Shahrudina & Sulaiman, 2015). Namun di sisi lain, organisasi gereja dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas keuangan untuk dapat

meningkatkan kepercayaan dan transparansi keuangan bagi para donatur (Dellaportas, 2019). Nilai sekuler mengarah pada peran organisasi yang perlu mempertanggungjawabkan sumber daya kepada umat sebagai salah satu *stakeholder* organisasi sebagai wujud nilai kejujuran. Dualisme ini secara tidak langsung mempersulit bentuk akuntabilitas keuangan dalam organisasi gereja. Pemahaman akuntabilitas keuangan yang berbeda-beda ini berdampak juga kepada tujuan dan fungsi akuntansi pada organisasi gereja. Persepsi mengenai sakral dan sekuler juga akan memengaruhi pelaporan keuangan gereja. Pendekatan sakralitas cenderung berpendapat bahwa akuntansi tidak perlu diaplikasikan pada gereja, sehingga akuntabilitas keuangan tidak menjadi sebuah kebutuhan. Namun, berbagai kasus yang berkaitan dengan keuangan gereja telah menimbulkan penafsiran bahwa sakralisasi tanpa akuntabilitas keuangan dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan sumber daya (Muller, 2015).

Masalah praktik akuntabilitas keuangan dalam organisasi gereja telah dikaji beberapa kali, namun hanya pada topik-topik tertentu. Magliacani & Pietra (2019) berargumentasi bahwa kajian tentang penerapan akuntansi gereja secara umum difokuskan pada tiga hal. Masalah pertama adalah penjelasan tentang proses pelaporan akuntansi dan pengawasan pengelolaan keuangan internal yang lemah dalam gereja. Kedua adalah permasalahan mengenai bagaimana seharusnya akuntansi, pengawasan, dan pengelolaan keuangan dilakukan. Ketiga adalah pandangan terhadap perbedaan antara nilai spiritual dan non-spiritual atau sekuler dan non-sekuler yang memengaruhi penerapan akuntansi dalam organisasi gereja. Selain permasalahan tersebut, Ryandono & Wijayanti (2019) dan Shahrudina & Sulaiman (2015) turut mengungkapkan beberapa permasalahan terkait praktik akuntansi dalam organisasi keagamaan. Terdapat empat masalah yang disampaikan pada penelitian tersebut, yaitu praktik penerapan sakral dan sekuler yang masih berlaku, tingkat kepercayaan dalam organisasi yang tinggi menyebabkan pengendalian menjadi lemah, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan peran dan tanggung jawab, dan keterlibatan umat yang rendah. McPhail & Cordery (2019) memaparkan bahwa beberapa isu terkait masalah dalam praktik akun-

tansi gereja terdiri dari bentuk pengendalian yang lemah, pemanfaatan keuangan gereja yang kurang sesuai, pengetahuan akuntansi yang kurang kuat, terlalu mengandalkan kemampuan seseorang atau relawan dan bukan pada sistem organisasi, dan penerapan standar akuntansi yang sudah tidak sesuai. Senander (2017) mengutarakan bahwa permasalahan dalam akuntansi gereja tersebut berawal dari pemanfaatan informasi akuntansi yang tidak sesuai, sebagai contoh adalah penganggaran yang mengabaikan perencanaan jangka panjang. Selain itu, terdapat pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa laporan keuangan bukanlah hal penting bagi organisasi keagamaan. Kendati demikian, mengingat potensi sumber daya publik yang besar, diperlukan penemuan terkait pola pengelolaan keuangan yang sesuai karakteristik organisasi gereja demi mengefektifkan akuntabilitas keuangan, sekaligus untuk menghindari penyimpangan yang juga sangat mungkin terjadi.

Penelitian mengenai akuntabilitas keuangan gereja telah dilakukan sejak lama, namun bagaimana peran budaya dalam memengaruhi penerapan akuntabilitas pengelolaan sumber daya gereja masih belum cukup dijelaskan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek manajerial dan spiritual pada organisasi gereja. Pada kenyataannya, di Indonesia, keberadaan organisasi gereja juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat di tempat berdirinya gereja tersebut. Bahkan pada beberapa gereja ditemukan telah berakulturasi dengan budaya setempat, yang di antaranya adalah Gereja Kristen Protestan (Kaluvilla, 2013; Yahanpath et al., 2018). Proses akulturasi ini menyebabkan gereja tidak hanya memiliki nilai sakral dan sekuler, tetapi juga memunculkan pengaruh dari budaya setempat yang menjadi latar belakang organisasi tersebut (Bigoni et al., 2013; Jeacle, 2012; Marini et al., 2018). Kondisi ini menyebabkan proses penerapan akuntabilitas keuangan yang efektif menjadi lebih kompleks pada organisasi keagamaan dengan latar belakang budaya tertentu. Dengan kurangnya penjelasan mengenai faktor budaya lokal dalam memengaruhi akuntabilitas keuangan pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan bertujuan untuk mengkaji pengaruh budaya dalam penerapan akuntabilitas keuangan gereja. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran budaya lokal, khususnya

budaya Batak Toba dalam mendorong atau membentuk praktik akuntabilitas keuangan di Gereja Kristen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), suatu Gereja Kristen yang secara khusus berakulturasi dengan budaya Batak Toba. Pemahaman tentang peran budaya lokal dalam pola penerapan akuntabilitas keuangan pada organisasi keagamaan diperlukan untuk mewujudkan pola akuntabilitas keuangan yang efektif pada organisasi keagamaan, khususnya Gereja Kristen HKBP.

Dengan kompleksitas masalah penerapan akuntabilitas keuangan pada organisasi gereja, penelitian ini akan bertujuan untuk mengungkap bagaimana peran budaya lokal, yang dianut oleh organisasi, dalam penerapan akuntabilitas keuangan yang selama ini didominasi oleh konsep formal dari negara barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan situasi atau masalah penerapan akuntabilitas keuangan dari sudut pandang sistem informal organisasi, yaitu tradisi. Sehingga melalui gambaran ini, organisasi nonprofit diharapkan dapat menyadari nilai-nilai atau tradisi organisasi yang mungkin dapat diangkat sebagai dasar penerapan akuntabilitas keuangan.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan komparatif disiplin yang sesuai untuk membandingkan kasus yang terjadi dengan teori yang ada (Kamayanti, 2016; Sekaran & Bougie, 2017). Secara lebih khusus yaitu untuk dapat menggambarkan proses dari peranan budaya lokal dalam penerapan akuntabilitas keuangan pada suatu konteks organisasi gereja.

Objek penelitian ini adalah praktik akuntabilitas keuangan dalam Gereja Kristen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berada di Pontianak. Pemilihan objek ini didasari oleh alasan bahwa Gereja Kristen HKBP Pontianak merupakan gereja induk (*huria sabungan*) dari HKBP *Resort* Pontianak. Sebagai gereja induk, Gereja Kristen HKBP Pontianak menjadi model bagi gereja-gereja cabang (*pagaran*) lainnya. Gereja Kristen HKBP juga merupakan gereja yang berakulturasi dengan budaya Batak, sehingga gereja ini menjadi tempat ibadah bagi penganut agama Kristen yang berlatar belakang suku Batak, termasuk yang berada di tanah perantauan. Dengan demikian, gereja ini merupakan tempat berkumpul-

Tabel 1. Informan Penelitian (Disamarkan)

Nama	Jabatan
Sitrait	Bendahara Gereja
Patria	Ketua Majelis Perbendaharaan
Giring	Ketua Seksi <i>Zending</i>
Helen	Bendahara Seksi Sekolah Minggu
Monica	Bendahara Seksi Pemuda

nya komunitas suku Batak. Berdasarkan informasi pada tahun 2019, jemaat Gereja Kristen HKBP Pontianak berjumlah 3.200 orang. Hal ini merupakan keuntungan dari segi sumber daya yang dikelola, terbukti dari pendapatan gereja yang mencapai sebesar 6 miliar rupiah berdasarkan laporan keuangan tahun 2019. Dengan potensi dana masyarakat yang besar tersebut, diperlukan akuntabilitas keuangan untuk mencapai tujuan manajemen dan sejalan dengan tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini, upaya untuk memperoleh data ditempuh dengan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dilakukan karena dinilai efektif dalam pengumpulan data pada penelitian eksploratif (Parker & Northcott, 2016; Sekaran & Bougie, 2017), dan memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih mendalam dan multi dimensi (Alsharari & Al-Shboul, 2019). Informan yang dipilih untuk wawancara adalah para palaku pengelola keuangan pada Gereja Kristen HKBP Pontianak. Sehingga dapat diperoleh informasi yang sesungguhnya terjadi dalam pengelolaan keuangan.

Tabel 1 berikut ini berisi informan yang dipilih dalam penelitian. Informan yang telah dipilih merupakan pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan di Gereja Kristen HKBP. Dengan demikian, latar belakang proses kebijakan pengelolaan keuangan dapat lebih dijelaskan.

Wawancara dalam penelitian ini di jalankan dalam tiga tahapan, sebagaimana diungkapkan oleh Alsharari & Al-Shboul (2019), yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta manajemen dan analisis data. Pertama, tahap persiapan yang berisi penyusunan panduan wawancara (*interview protocol*). Penyusunan dan persiapan daftar pertanyaan ini bertujuan untuk menghindari jalannya wawancara yang melenceng jauh dari topik utama. Adapun jumlah pertanyaan yang dirancang untuk wawancara berbeda-beda

pada setiap informan, karena menyesuaikan fungsi dan kapasitasnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari pertanyaan wawancara penelitian Randa et al. (2011) dan Wibowo & Kristanto (2018). Sebagaimana wawancara semi-terstruktur pada umumnya, pertanyaan wawancara mengalami pengembangan ketika penelitian sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh atas keterangan informan guna memperinci data yang diperoleh peneliti. Pada tahap pelaksanaan, wawancara dimulai dari bendahara gereja (*bendahara huria*) dan bendahara kategorial. Kedua informan ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas keuangan di Gereja Kristen HKBP Pontianak, sehingga penelitian dapat memperoleh informasi terkait dengan faktor-faktor yang berdampak pada akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Selanjutnya, wawancara dilakukan bersama majelis perbendaharaan guna memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi seluruh unsur dalam penelitian ini, yaitu akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal.

Kedua adalah pelaksanaan yang terdiri dari observasi guna menghindari perolehan data yang bias. Adapun jenis observasi yang dilakukan adalah observasi tersembunyi (*hidden observation*) dengan pendekatan perilaku (*behavioral observation*), khususnya analisis non-verbal dan analisis linguistik. Observasi jenis ini dipilih untuk menghindari reaktivitas informan yang dapat memengaruhi validitas temuan peneliti.

Ketiga, pengkategorian hasil wawancara dengan kode. Pertanyaan semi terstruktur digunakan pada wawancara yang diarahkan untuk mengeksplorasi sisi psikologis para informan, filosofi manajerial yang selama ini berlaku pada Gereja Kristen HKBP Pontianak, dan budaya organisasi pada Gereja Kristen HKBP Pontianak. Ketiga faktor ini digunakan sebagai kategori un-

tuk dapat mengungkap praktik akuntabilitas keuangan dan menggali faktor-faktor yang memungkinkan Gereja Kristen HKBP Pontianak untuk menerapkan akuntabilitas keuangan.

Data yang telah diperoleh kemudian akan disajikan berdasarkan analisis data yang telah ditentukan. Metode ini terbagi dalam tiga tahap yang diawali dengan kondensasi data. Istilah kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasi data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum keterangan informan yang diperoleh saat wawancara dan hasil observasi. Pada tahap ini akan disampaikan gambaran umum mengenai proses pengelolaan keuangan yang selama ini dilakukan di Gereja Kristen HKBP Pontianak. Kemudian yang kedua adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan data yang telah terorganisasi sebagai informasi secara ringkas untuk menjembatani penarikan kesimpulan. Adapun datanya akan berbentuk narasi yang dilengkapi dengan transkrip wawancara. Pada tahap ini, hasil wawancara akan dimaknai sesuai faktor-faktor dari teori yang dapat menjelaskan peranan unsur pengelolaan keuangan, yaitu psikologis, filosofi manajemen, dan budaya organisasi, yang dalam hal ini adalah Gereja Kristen HKBP. Ketiga, pembahasan yang berdasarkan pendekatan studi kasus. Dari data yang disajikan akan ditarik kesimpulan, yaitu deskripsi mengenai bagaimana budaya mempengaruhi akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal di Gereja Kristen HKBP Pontianak beserta maknanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan keuangan gereja.

Permasalahan dalam penerapan akuntabilitas keuangan pada organisasi agama atau berbasis agama disebabkan oleh lingkungan organisasi tersebut. Laporan keuangan secara formal bukanlah tuntutan dalam organisasi ini, bahkan sebagian gereja belum memperhatikan dan terkesan tertutup dalam pengelolaan keuangannya. Akuntabilitas keuangan merupakan aktivitas informal pada organisasi keagamaan karena sikap berbuat baik dan religiusitas mendorong orang untuk berbuat baik tanpa tuntutan laporan. Dana sumbangan tersebut juga merupakan wujud dari nilai agama yang

diyakini, sehingga menimbulkan kepuasan kepuasan tersendiri. Dengan demikian, tidak adanya tuntutan laporan formal dari umat atau penyumbang juga dikarenakan sebagian orang secara salah mengasumsikan bahwa tuntutan semacam itu menunjukkan ketidakikhlasan (Teah et al., 2014; Yasmin et al., 2014).

Kondisi ini menyebabkan kurangnya tuntutan terhadap akuntabilitas keuangan oleh anggota atau umat yang kemudian berakibat pada lemahnya kontrol publik terhadap penggunaan dana (Sadornil et al., 2017). Pengelolaan keuangan organisasi keagamaan lebih berdasarkan pada kepercayaan dan perwujudan nilai agama yang diyakini (Cecere et al., 2017; Santoso & Soeherman, 2021). Selain itu, tidak adanya kewajiban penyampaian laporan keuangan menyebabkan tidak adanya standar pelaporan keuangan yang harus diterapkan. Akibatnya adalah praktik laporan keuangan menjadi beragam dan membuat bentuk akuntabilitas keuangan organisasi keagamaan juga sulit ditentukan (Petske, 2018).

Adanya pandangan terkait dengan sakral dan sekuler pada lembaga agama juga membuat penerapan akuntabilitas keuangan menjadi lebih kompleks. Terlebih kedua pandangan tersebut akan selalu melekat pada organisasi keagamaan. Oleh karena itu, lembaga agama perlu menemukan cara terbaik untuk menerapkan akuntabilitas keuangan yang sesuai.

Adapun kesesuaian akuntabilitas keuangan ini dapat disebabkan juga karena asas atau nilai dasar yang mungkin berbeda pada setiap organisasi keagamaan. Perbedaan bentuk transaksional pada organisasi keagamaan ini juga dapat disebabkan oleh nilai yang diyakini. Dalam hal ini, budaya lokal menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai filosofi manajemen, untuk kemudian nilai manajerial tersebut yang akan memengaruhi cara pengelolaan organisasi keagamaan, termasuk pengelolaan keuangan.

Praktik akuntabilitas keuangan pada gereja dipengaruhi oleh pandangan terhadap sakralitas dan sekularitas dalam gereja, yang dalam hal ini, akuntansi dinilai sebagai aktivitas sekuler (Petzke, 2018). Styhre (2014) dan Tanasal et al. (2019) telah menjelaskan bahwa dualisme, sakral dan sekuler, memiliki dua bidang yang berbeda. Dalam organisasi keagamaan, sakralitas adalah aktivitas rohani, sedangkan sekuler adalah aktivitas

organisasi terkait dengan organisasi. Dua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda dan menyebabkan penolakan terhadap praktik akuntansi karena dianggap tidak sesuai untuk diterapkan pada institusi keagamaan yang sifatnya sakral. Di sisi lain, karakteristik sakralitas yang terlalu dominan dapat disalahgunakan oleh elemen-elemen tertentu dalam organisasi dengan mengatasnamakan suatu yang ilahi (Muller, 2015). Situasi ini dapat mendorong lemahnya pengendalian dalam organisasi gereja.

Laporan keuangan organisasi gereja merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa catatan berisi penyajian informasi keuangan yang sesuai, akurat, dan andal (Dellaportas, 2019). Akuntansi gereja merupakan bagian dari akuntansi dana yang merupakan sistem pencatatan terpisah untuk setiap aset (McPhail & Cordery, 2019). Dalam lingkungannya sebagai organisasi nirlaba atau non profit, organisasi gereja di Indonesia menyampaikan praktik akuntansinya melalui PSAK No. 45 yang berlaku sebelum 1 Januari 2020, sedangkan standar yang baru adalah ISAK 35 yang berlaku per 1 Januari 2020. Menurut ISAK 35, lembaga non profit wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut dapat disampaikan secara lebih rinci pada catatan atas laporan keuangan. Kendati telah terdapat acuan standarnya, beberapa organisasi gereja pada praktik penyusunan pedoman laporan keuangannya cenderung menyesuaikan kondisi dan ketentuan organisasi masing-masing.

Proses akuntabilitas keuangan gereja. Dalam ajaran Kristen terdapat beberapa ajaran dari Kitab Suci yang terkait dengan bagaimana orang Kristen bekerja dalam dalam suatu kelompok atau organisasi. Dalam 1 Korintus 10:24 disebutkan bahwa seseorang tidak boleh mencari keuntungannya sendiri, melainkan bagi orang lain. Kemudian terdapat firman Tuhan dalam Filipi 2:3-4 yang menyatakan bahwa setiap manusia harus mengutamakan kepentingan Bersama.

Ajaran ini mengindikasikan bahwa manusia memiliki dua tanggung jawab, yaitu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Sebagai sebuah lembaga keagamaan Kristen, gereja tidak dapat dilepaskan dari pemahaman spiritual sebagai dasar yang

pokok bagi tindakan moral (Cristian, 2020). Setiap hal yang dilakukan harus didasari dengan dasar Alkitabiah, karena Alkitab diyakini sebagai pedoman hidup dan tata laku warga gereja, demikian pula halnya dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Keyakinan Alkitabiah ini dapat memengaruhi sikap para pengelola atau pengurus dalam menerapkan praktik akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Keyakinan Alkitabiah dapat diistilahkan sebagai komitmen pengelola terhadap nilai organisasi. Komitmen terhadap nilai organisasi menempatkan pengelola gereja sejajar dengan umat atau jemaat karena keduanya memiliki visi, nilai, misi, dan upaya bersama untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa hanya beberapa informan yang memiliki keyakinan Alkitabiah yang spesifik dalam menjalankan fungsi akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Bendahara gereja dalam pernyataannya mengungkapkan secara implisit bahwa ayat Alkitab yang menjadi pedoman baginya adalah Lukas 12:35-48. Ayat ini berbicara mengenai perumpamaan tentang hamba yang melaksanakan tugas dengan baik, selalu berjaga-jaga, dan siap sedia, meskipun sedang ditinggal pergi oleh tuannya. Pandangan tersebut dijelaskan oleh pernyataan Key (2017) dan Wignall (2016) bahwa berdasarkan teori *stewardship*, bahwa pengurus organisasi bertindak sebagai pelayan dan bertindak untuk melakukan hal yang benar (*doing the right thing*).

Selain itu, praktik akuntabilitas keuangan secara Alkitabiah dapat merujuk pada Matius 5:37 sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Ayat tersebut merupakan amanat dari Tuhan Yesus supaya manusia bertindak jujur dalam segala hal dan tidak memberi peluang kepada iblis yang dapat menggoda untuk bertindak tidak jujur. Dengan menjalankan amanat ayat ini dalam hal akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal, perilaku bendahara sekolah Minggu menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Stone & Erickson, 2017). Integritas dan kejujuran adalah aspek yang sangat penting untuk dijalankan oleh pengelola dengan konsis-

ten, karena elemen utama untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah kepercayaan (Keay, 2017). Kepercayaan jemaat terhadap pengelola gereja menjadi kunci untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Pada praktiknya, pihak gereja telah melaporkan keuangannya secara rutin. Dalam warta keuangan setiap hari minggu tercantum rekapitulasi penerimaan yang ditulis dalam bahasa Batak Toba. Laporan penerimaan dibagi dalam beberapa bagian menurut sumbernya, seperti penerimaan dari persembahan ibadah hari minggu, penerimaan dari perpuluhan, penerimaan dari persembahan syukur, dan sebagainya. Setiap bulan, bendahara juga akan menyampaikan laporan keuangan. Pada akhir tahun, bendahara juga akan menyampaikan laporan keuangan tahunan di hadapan forum jemaat, yakni ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember. Laporan keuangan yang disusun menyajikan penerimaan dan pengeluaran. Menurut bendahara gereja, model ini dipertahankan dengan alasan agar mudah diperbandingkan dengan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan dibagi dalam lima pos besar, yaitu penerimaan yang dialokasikan untuk gereja, penerimaan yang dialokasikan untuk gedung serbaguna (*sopogodang*), penerimaan dari persembahan syukur, penerimaan yang dialokasikan untuk pusat, dan penerimaan yang dialokasikan untuk pembangunan. Pengeluaran juga dibagi dalam lima pos besar, yaitu pengeluaran untuk gereja, pengeluaran untuk gedung serbaguna, pengeluaran yang menggunakan persembahan syukur, pengeluaran untuk pusat, dan pengeluaran untuk pembangunan. Penyampaian tersebut disertai uraian penggunaan pada setiap bagiannya.

Untuk mempermudah jemaat dalam memahami laporan keuangan, bendahara gereja juga membuat ringkasan laporan keuangan yang dibagi dalam lima pos besar sebagaimana laporan keuangan yang telah dijabarkan di atas. Dalam setiap pos akan diuraikan secara singkat saldo awal, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan saldo akhir. Ringkasan tersebut juga akan memuat saldo akhir kas dan saldo rekening bank. Laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan akan diaudit oleh badan audit. Berdasarkan aturan sinode, badan audit adalah suatu organ yang melaksanakan audit keuangan, aset, dan pengu-

rus gereja. Badan audit terdiri dari tiga orang penatua/jemaat yang dipilih dalam rapat jemaat. Kendati demikian, penyusunan laporan keuangan gereja belum berpatokan pada suatu standar. Hal ini diakui oleh Patria dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Nah, itu...pakai standar yang lama, tapi *gak* tahu standar apa itu. Kita pun ikut yang lama, mau dibuat yang baru tapi katanya (pertahankan saja yang lama) supaya bisa dibanding-bandingkan” (Patria).

Pernyataan Patria menunjukkan bahwa tidak ada penerapan sistem akuntansi secara absolut pada gereja. Bahkan tersirat fakta lain bahwa belum terdapatnya aturan terkait keuangan yang baku dan berlaku umum bagi seluruh anggota sinode. Dikarenakan praktik yang selama ini terjadi hanyalah sebagai upaya mempertahankan tradisi pengelolaan dan pelaporan yang telah telah diterima oleh setiap pihak. Ketiadaan standar inilah yang kemudian menyebabkan ketidakseragaman prosedur, baik dalam pengendalian internal maupun pelaporan keuangan. Sebagai contoh adalah pelaporan dana sosial sebagai salah satu pos yang kerap menimbulkan kebingungan dalam prosedur pengendalian internal, terutama dalam pembuatan alat bukti. Dalam akuntansi, alat bukti adalah hal yang sangat penting dan otentik untuk mendokumentasikan setiap transaksi, baik pengeluaran maupun penerimaan, namun secara etika tampaknya sulit untuk membuat alat bukti ketika melakukan pemberian dana sosial kepada anggota jemaat.

Sebagai suatu gereja yang berdasar pada suatu budaya tertentu, pihak gereja memiliki budaya organisasi yang erat dengan budaya Batak Toba dari Sumatra Utara. Budaya organisasi ini juga tampak pada cara mengelola keuangan gereja tersebut. Salah satu budaya lokal yang mempengaruhi proses pengelolaan keuangan adalah kerja sama atau gotong royong. Dalam adat-istiadat Batak, kerja sama dikenal dengan istilah *marsiadapari*. Pada mulanya, *marsiadapari* merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Batak dalam bercocok tanam di sawah/ladang. Kegiatan ini telah menjadi tradisi yang dilakukan secara serentak untuk saling meringankan be-

ban, sebagaimana filosofi masyarakat Batak, “*Dokdok rap manuhuk, neang rap manea*”, yang secara harafiah dapat dimaknai, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Dalam konteks akuntabilitas keuangan, kerja sama dan kolektivitas sangat dibutuhkan karena kebersamaan dengan tujuan kolektif dan hubungan timbal balik dapat membangun hubungan jangka panjang yang bermanfaat bagi seluruh pihak dan dapat bermuara pada kepercayaan umat kepada pengelola (Keay, 2017; Wignall, 2016). Teori *stewardship* menunjukkan pola pengelolaan keuangan di gereja tersebut yang pada praktiknya mengarah pada praktik adanya kerja sama sebagai bentuk kolaborasi. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya keterangan para informan terkait dengan praktik akuntabilitas keuangan oleh pengurus gereja yang dilakukan secara kolektif, seperti pernyataan Sitrait berikut ini:

“Kalau selama ini kan memang bendahara yang mengerjakan itu (keuangan gereja), hanya dibantu oleh rekan-rekan pelayanan waktu menghitungnya. Tapi tanggung jawab kita pribadi (bendahara gereja). Jadi kalau dibilang kolektif, kebersamaan waktu menghitungnya itu dan masing-masing menyerahkan (persembahan syukur yang dititipkan kepada penatua)” (Sitrait).

Sitrait mengungkapkan bahwa bendahara gereja memiliki peran dan fungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan gereja. Akan tetapi, terdapat proses perhitungan bersama atas dana atau persembahan umat yang diterima. Bendahara gereja menjelaskan dengan yakin bahwa cara ini merupakan cara yang dilakukan sebagai bentuk keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam pengendalian dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, prinsip kerja sama juga tercermin pada saat pergantian kepengurusan. Kerja sama ditunjukkan dengan kesediaan bendahara demisioner ataupun pengurus inti lainnya untuk membimbing bendahara yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti yang dikemukakan oleh Monica dan Helen berikut:

“Kalau kesulitan *yah* minta bantu sama pengurus inti, cari pemecahan masalah sama-sama” (Monica).

“Senior *tuh* ada yang bantu. Dia ngajarin untuk bikin buku keuangan, kas masuk-kas keluar, segala macam *tuh* diajarin sama dia. Jadi, walaupun *basicnya* sama sekali *gak* ada, *yah* bisalah” (Helen).

Pernyataan Monica dan Helen mengindikasikan bahwa adanya dukungan untuk menggenerasikan pola pengelolaan keuangan yang ada selama ini. Kesediaan bendahara terdahulu dan pengurus inti untuk membimbing bendahara yang baru adalah suatu bentuk kolaborasi yang memungkinkan bendahara baru untuk belajar banyak dalam hal akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Hal ini menjadi proses yang sangat berarti dan bermanfaat bagi para pengelola yang belum pernah memperoleh pendidikan akuntansi atau keuangan.

Budaya kerja sama ini membawa budaya keterbukaan pada proses pengelolaan keuangan. Penerapan nilai kolaborasi bukan hanya menciptakan dukungan yang ‘satu suara’, melainkan juga menumbuhkan iklim yang siap untuk mengkritik dan dikritik. Hal ini diungkapkan oleh Giring dan Monica pada kutipan sebagai berikut

“*Yah* kalau kritik, perdebatan, itu hal yang biasalah. Di dalam *kan* bisa saja kita beradu ide, tapi di luar kita tetap bersatu sebagai pelayan Tuhan” (Giring).

“Setiap dikritik dan itu positif, ya pasti kita terima *lah*. Hal ini bisa (sebagai) pembelajaran untuk lebih baik” (Monica).

Pernyataan Giring dan Monica menunjukkan bahwa dalam upaya pengelolaan keuangan bersama terdapat dinamika ide dan pendapat dalam wujud kritik, saran, dan beberapa perdebatan. Informan juga dengan senang hati menyampaikan bahwa munculnya dinamika tersebut dikarenakan prosesnya menjadi bagian dari budaya kerja yang ada. Kondisi ini merupakan situasi yang unik dalam organisasi keagamaan yang dapat muncul karena belum adanya standar

baku yang diacu. Sekaligus membuka peluang bagi banyak pihak untuk dapat terlibat dalam pengelolaan dengan ide atau pendapat yang berbeda-beda.

Selain faktor budaya, pihak gereja juga mengalami dualitas peran lembaga keagamaan, yaitu sakral dan sekuler yang kemudian acap kali menjadi perdebatan yang menghambat penerapan akuntabilitas keuangan (Beales, 2021; Wibowo & Kristanto, 2018). Hal ini berdampak pada penerapan akuntansi sebagai sistem atau pola pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, namun tidak ditemukan di pihak pengurus gereja. Bagi informan, penerapan akuntansi di gereja bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Bahkan, Patria secara tegas juga mengungkapkan pandangannya bahwa akuntansi bukan merupakan hal yang tergolong sekuler. Berikut ini adalah pernyataannya:

“Tidak ada sekuler itu (akuntansi – akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal). Akuntansi itu kan ilmu pengetahuan, kan menggabung ilmu pengetahuan dengan keagamaan” (Patria).

Pernyataan Patria menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya bertentangan, tetapi dapat saling mendukung. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa akuntansi sebagai hasil dari ilmu pengetahuan diperlukan untuk dapat menopang praktik yang baik sebagai upaya mewujudkan nilai religiusitas. Sejalan dengan pendapat tersebut, bendahara seksi sekolah minggu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pertentangan tersebut dan menganggap bahwa akuntansi adalah hal yang penting bagi gereja.

“Aku *gak* setuju *sih*. Pembukuan yang baik kan menunjukkan bahwa gereja itu berjalan sesuai Alkitab. Akuntansi itu perlu untuk kesehatan gereja, bagaimanapun kan gereja itu berjalan dari uang jemaat. Anggaplah kalau *gak* ada pembukuan yang jelas, pasti suatu gereja itu *gak* jelas juga.” (Helen)

Sebagai orang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, Helen memahami kebutuhan metode ilmu pengetahuan untuk mendukung tercapainya nilai-nilai religiusitas yang diyakini dalam gereja. Dalam hal ini, dikotomi sekuler dianggap sebagai hal yang tidak sesuai, karena akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal dimaksudkan untuk kebaikan. Hal inilah yang diungkapkan oleh Giring dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Pengelola keuangan gereja itu kan harus memegang prinsip-prinsip kejujuran, jadi (akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal) itu tidak bisa juga dikatakan sekuler. Saya kira di dalam akuntansi itu *kan* tidak ada (maksud) mencari-cari kesalahan, tetapi untuk melihat bagaimana sebenar-benarnya uang itu digunakan. Justu kalau ada anggapan (untuk) tidak *usah* menggunakan akuntansi pada gereja mungkin malah bisa jadi (ada) penyelewengan” (Giring).

Pernyataan Giring menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap konsep penempatan akuntansi sebagai hal sekuler yang tidak tepat untuk diterapkan pada lembaga keagamaan. Giring berpendapat bahwa akuntansi dalam akuntabilitas keuangan adalah hal yang penting bagi gereja, bahkan mencerminkan kesehatan pengelolaan keuangan gereja. Pandangan ini menunjukkan bahwa gereja terbuka pada makna ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk kebaikan. Kendati demikian, akuntansi tetap dianggap tidak dapat diterapkan secara absolut pada gereja. Hal ini diutarakan oleh Patria dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Memang kalau akuntansi dijalankan secara total, ada yang bertentangan. Kenapa? Karena (gereja) ini *kan* lembaga sosial tinggi, beda dengan perusahaan. Kadang kala (di gereja) ada (transaksi) yang tidak ada bukti, sedangkan kalau di akuntansi kan harus ada bukti semua. Misalkan, kita memberikan (dana) sosial karena (ada warga jemaat) yang

sakit, itu kan *gak* mungkin kita minta (jemaat yang sakit) menandatangani bukti atau kwitansi. Jadi paling kita minta *parhaladonya* (majelisnya) menandatangani di pembukuan” (Patria).

Permasalahan yang disampaikan oleh Patria mengindikasikan bahwa proses transaksi dalam gereja yang tidak bisa selalu disamakan dengan transaksi bisnis umum yang berdasarkan pada bukti transaksi. Dalam hal ini, pengelola gereja telah menggunakan cara yang lebih dapat diterima oleh berbagai pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, yaitu pihak yang mengambil uang adalah yang akan menandatangani bukti pengeluaran dana sosial tersebut. Walaupun ada celah penyalahgunaan, langkah ini dapat dilakukan karena adanya keyakinan terhadap nilai religiusitas yang dianut bersama.

Pengelolaan keuangan dalam gereja selaku lembaga agama juga dipengaruhi oleh nilai ajaran agama Kristen. Prinsip-prinsip moral yang tinggi dalam menjalankan fungsi akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal, seperti kejujuran, menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan, dan menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan baik, seperti diutarakan oleh Monica dan Patria sebagai berikut:

“Ya, kita sudah diberi kepercayaan jadi harus menjalankannya dengan baik” (Monica).

“Kita *kan* berprinsip bahwa ini gereja, jadi semuanya harus dijalankan sesuai (dengan sebagaimana mestinya) dan tidak menyimpang” (Patria).

Pernyataan Monica dan Patria sebagai pengelola keuangan menunjukkan bahwa keyakinan terhadap nilai kabaikan seseorang akan membuat kontrol menjadi lebih efisien. Keyakinan Alkitabiah dan prinsip moral akan mendorong pengelola untuk senantiasa menjalankan fungsinya secara profesional. Informan pada penelitian ini juga meyakini bahwa profesionalitas diperlukan dalam praktik akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Profesionalitas yang diterapkan oleh pengelola dapat menjadi nilai yang penting bagi pembangunan

jemaat, seperti yang diutarakan oleh Giring pada kutipan sebagai berikut:

“Orang-orang yang profesional ini *kan* pikirannya lebih dinamis. Dia bisa memberikan pencerahan-pencerahan di gereja kepada jemaat-jemaat. Kalau untuk bidang kebendaharaan ya sedikit-banyaknya harus menerapkan profesionalisme *lah*” (Giring).

Bagi pengurus gereja, profesionalitas menjadi nilai yang dibutuhkan dalam pertanggung jawaban keuangan. Pernyataan Giring didukung dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi bendahara gereja dan majelis perbendaharaan berdasarkan aturan sinode yaitu melakukan pelayanannya dengan baik dan tidak berlaku curang, dan berpendidikan minimal SMA serta memahami manajemen keuangan, terutama akuntansi.

Faktor penting lain yang perlu ada dalam pengelolaan keuangan adalah adanya loyalitas terhadap organisasi. Loyalitas yang diterapkan dalam menjalankan akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal di gereja memiliki orientasi yang lebih jauh, bukan hanya loyalitas kepada organisasi, melainkan juga kepada Tuhan.

Loyalitas dapat membuat pengelola terpacu untuk berkorban bagi kepentingan organisasi dan hal ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang ganjil, bahkan menjadi penghargaan intrinsik bagi pengelola. Sejalan dengan itu, Helen menyatakan demikian:

“Gereja itu *kan* tidak membayar kita *ya*. *Ya*, aku juga sering *nom-bok* kalau *gak* dapat titik temu (di pembukuan). Jadi *ya*, benar-benar hati yang digunakan untuk pelayanan ini, karena sepeser pun kita *gak* dapat keuntungan dari pelayanan. *Nah*, loyalitas tuh diperlukan untuk bisa mengerjakan semuanya dengan baik, sepenuh hati lah supaya program berjalan dengan baik. *Yah kan* Tuhan bilang, berikan yang terbaik untuk Tuhan *kan*” (Helen).

Pernyataan Helen mempertegas bahwa semangat profesionalitas yang mengakar pada loyalitas mendorong pengelola untuk

melakukan yang terbaik bagi organisasi. Istilah yang unik muncul dari pernyataan Helen di atas adalah munculnya kesadaran dan kerelaan untuk menggunakan praktik profesionalitas untuk tujuan yang mulia, yaitu pelayanan terhadap gereja. Tindakan yang berorientasi pada kebaikan organisasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah inisiatif untuk menerapkan sistem akuntabilitas keuangan yang lebih baik, seperti yang diutarakan oleh Helen sebagai berikut:

“Aku kalau di perusahaanku membuat suatu *report* yang bagus. *Report* ini kalau misalnya bisa aku *adopt* ke gereja, itu bakal aku *adopt*. Kenapa? Pertama mempermudah sistem, jadi lebih gampang dan lebih terinci. Kedua, membuat komunikasi dengan yang lain *tuh* jadi lebih bagus” (Helen).

Pernyataan Helen menunjukkan bahwa dirinya berinisiatif untuk mengadopsi suatu sistem pelaporan keuangan yang baik untuk diterapkan pada organisasinya dengan tujuan memperinci pelaporan keuangan dan menjadikan laporan keuangan lebih informatif, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh pihak, sekalipun orang yang masih awam dengan akuntansi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pengelola menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh dengan menerapkan pengetahuannya secara optimal pada praktik akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Tindakan ini merupakan suatu inisiatif yang didasari oleh komitmen pengelola untuk melakukan hal yang benar (*doing the right thing*) (Beales, 2021; Wibowo & Kristanto, 2018).

Berdasarkan teori *stewardship*, motivasi intrinsik yang muncul dari pengelola atau pengurus gereja merupakan dorongan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (Keay, 2017; Prado-Lorenzo et al., 2017). Motivasi inilah yang membuat pengelola atau pengurus secara ikhlas melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kepentingan bersama, lebih dari keuntungan pribadi (Wignall, 2016). Hal ini juga diungkapkan oleh Sitrait pada kutipan berikut ini:

“Uang itu penggunaannya sesuai dengan program kerja, tidak ada

yang menyimpang, tidak ada yang disalahgunakan. Itu saja. *Makanya* jemaat pun boleh mengontrol itu. Pengeluaran ini yang harus kita jaga, supaya tepat sasaran, tepat guna *ya*, dan pelayanan semakin baik. Kalau saya itu kecenderungannya bagaimana supaya menghemat. Bukan pelit *ya*, efisiensi *lah*” (Sitrait).

Bagi bendahara gereja, hal yang terpenting adalah bagaimana sumber daya dana yang dimiliki bisa digunakan secara tepat sasaran dan efisien. Implikasinya, jemaat pun memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dana tersebut. Lebih lanjut, Sitrait mengungkapkan bahwa penggunaan uang dan kontrol jemaat berimplikasi positif bagi pelayanan. Berikut ini adalah pernyataannya:

“*Ya*, memang *iya* harus begitu kualitas pelayanan itu. Tugas *diakonia*, *koinonia*, dan *marturia* harus jalan” (Sitrait).

Pernyataan Sitrait menunjukkan bahwa penggunaan dana yang tepat sasaran dan efisien akan berdampak pada pelayanan yang semakin baik. Dampak tersebut adalah yaitu pelayanan yang mampu menjalankan tritugas panggilan gereja (*diakonia*, *koinonia*, dan *marturia*) secara berkualitas, seimbang, dan konsisten.

Pada sisi lainnya, Indonesia masih melekat pada budaya “*sungkan*” dalam membicarakan pengelolaan keuangan gereja, namun hal ini tidak ditemui pada majelis dan jemaat. Praktik akuntabilitas keuangan di gereja tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan gereja berbasis budaya tertentu, sehingga dapat menyebabkan praktik akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh karakteristik mayoritas masyarakat Batak yang berani untuk mengemukakan pendapat secara terus terang, seperti yang diungkapkan oleh Patria sebagai berikut:

“Kita *gak* ada segan-segan disitu, karena memang sudah ada aturannya. Jadi kalau tidak ada kwitansi atau tidak sesuai, itu kita kembalikan untuk diperbaiki. Jadi *gak* ada istilahnya kita diamkan, itu (dokumen) tetap kita kembalikan, siapa pun itu (benda-

hara yang melakukan kekeliruan). Kita tidak tanda tangani sebelum diperbaiki” (Patria).

Pernyataan Patria menunjukkan pengurus gereja tidak akan sungkan untuk menegur sesama pengurus gereja lainnya ketika terindikasi melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tentu menjadi sebuah pengendalian internal yang baik minimal dalam lingkungan sesama pengurus gereja.

Di samping itu, jemaat juga memiliki keterlibatan dalam mengontrol praktik akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal. Jemaat dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan sarannya dalam forum rapat jemaat (rapat *huria*). Rapat *huria* juga sering diwarnai dengan kritik dan saran yang disampaikan secara terus terang oleh jemaat. Hal ini dibuktikan dengan notula rapat *huria* tahun 2020 yang memuat pendapat-pendapat jemaat. Beberapa pendapat tersebut antara lain mengkritisi permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan aset gereja.

Pendapat yang diungkapkan secara terus terang akan bermanfaat dalam praktik akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal, karena dengan mendengarkan pendapat dari jemaat atau umat, pengelola gereja akan mampu menyelaraskan tujuannya untuk kebaikan organisasi.

Berdasarkan pendapat jemaat yang dicatat dalam notulen rapat *huria* tahun 2020, sebagaimana dikutip penulis di atas, dapat diidentifikasi faktor lain yang berpotensi menjadi hambatan dalam praktik akuntabilitas keuangan di gereja tersebut, yaitu ketiadaan pegawai keuangan. Hal ini juga diakui oleh Sitrait ketika dalam wawancara penulis menanyakan tentang ketiadaan pos pengeluaran pada warta keuangan mingguan. Berikut ini adalah pernyataannya:

“Kita belum bisa melaporkan pengeluaran setiap minggu karena keterbatasan SDM. Selain itu juga ada transaksi tertentu yang notanya gak langsung datang (disampaikan). Contohnya *kayak fotocopy*, gorengan (konsumsi ringan untuk kegiatan). Ya itulah, karena *gak* ada kasir (staf keuangan) itu, makanya susah untuk merekapnya mingguan” (Sitrait).

Pernyataan Sitrait menunjukkan bahwa pengurus gereja membutuhkan pekerja di bidang keuangan untuk proses laporan pertanggungjawaban karena pekerja yang ada sementara ini bukan pekerja penuh waktu. Mereka adalah orang yang melakukan pelayanan secara paruh waktu yang tidak bisa selalu berada di gereja. Akibatnya, bila terdapat pihak yang ingin menggunakan dana, maka harus menempuh sistem *reimburse*. Di samping itu, transaksi tidak selalu bisa dicatat secara langsung saat terjadi, terutama untuk transaksi pengeluaran. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 gereja berencana untuk mempekerjakan seorang pegawai keuangan.

Hal ini menjadi salah satu poin keputusan dalam rapat *huria* tahun 2020. Keputusan ini mengindikasikan bahwa pengurus gereja menyadari kebutuhan pengelolaan yang baik, yang diawali kesesuaian sumber daya manusia. Menurut teori *stewardship*, kondisi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan peran budaya yang turut memberikan dampak pada upaya perwujudan akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal gereja. Teori *stewardship* menilai bahwa manajer atau pengelola akan dapat mencapai kinerja terbaik ketika seseorang tersebut memiliki dorongan dari nilai internal yang salah satunya dapat berasal dari nilai religiusitas, budaya, atau kombinasi dari berbagai nilai yang dimiliki (Segal & Lehrer, 2012). Teori ini menjelaskan konteks pengelolaan keuangan yang juga terjadi di gereja karena gereja sebagai organisasi keagamaan yang tidak lepas dari peran jemaat atau umat anggota gereja dan peran pengelola organisasi gereja, sebagai pelayan atau *steward*, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan gereja sesuai yang diharapkan organisasi (Jeacle, 2012). Selain itu, teori *stewardship* juga mengungkap faktor internal dalam pengelolaan organisasi, antara lain psikologi, filosofi manajemen, dan kultur atau budaya organisasi yang berasosiasi positif terhadap penerapan akuntabilitas keuangan (Bernstein et al., 2017; Patty & Irianto, 2013).

Dukungan psikologis dalam praktik akuntabilitas keuangan gereja. Pertentangan konsep sakralitas dan sekuler dalam organisasi keagamaan, seperti gereja, merupakan isu yang telah lama ada. Kedua pandangan yang berbeda ini menyebabkan praktik akuntabilitas keuangan menjadi sulit untuk

diterapkan pada organisasi gereja (Muller, 2015; Petske, 2018). Lemahnya akuntabilitas keuangan gereja juga didukung dengan lemahnya tuntutan terhadap akuntabilitas keuangan organisasi gereja oleh umat dan pengelola (Yasmin et al., 2014). Kendati demikian, hasil wawancara ini menunjukkan situasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hasil wawancara mengungkap bahwa pertentangan konsep sakralitas dan sekuler tidak terjadi pada pengurus gereja. Hasil analisa wawancara menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut bukanlah hal yang bertentangan, melainkan dapat saling mendukung atau melengkapi (Melé & Fontrodona, 2017). Didukung oleh teori *stewardship*, penelitian ini mengungkap bahwa secara psikologi personal pengurus gereja, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk dapat melakukan tugas dan perannya sebagai pengurus gereja. Tuntutan praktik akuntabilitas keuangan menjadikan motivasi untuk dapat melakukan tugas pelayanan dengan lebih baik. Motivasi pelayanan yang kuat membuat pandangan terhadap proses akuntabilitas keuangan yang “rumit”, berubah menjadi sarana untuk melakukan inovasi (Adhi & Kristanto, 2017; Funnell & Williams, 2014).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor psikologi dipengaruhi oleh motivasi. Secara sederhana, motivasi dalam teori *stewardship* digambarkan sebagai faktor psikologis berupa dorongan intrinsik pada diri pengelola gereja atau steward untuk mewujudkan kepentingan bersama dan keberhasilan organisasi. Motivasi intrinsik tersebut akan membentuk tantangan internal pada diri *steward* yang menggiring pada tingkat kinerja yang lebih tinggi (Keay, 2017). Hasil temuan peneliti sejalan dengan konstruksi tersebut. Sebagian besar pernyataan informan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal merupakan tantangan baginya secara personal. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan bahwa dana yang dikelola bukan semata milik manusia, melainkan adalah milik Tuhan. Informan berupaya untuk berperan sebagai *steward* yang berupaya dengan sungguh untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi, sesuai dengan peran dan tanggung jawab para pengelola, yakni dengan cara mengupayakan pengelolaan keuangan agar sesuai tujuannya (Cui et al., 2015; Graham & Grisard, 2019).

Selanjutnya, motivasi yang dimiliki oleh pengelola atau *steward* mendorong mereka untuk melakukan aksi nyata bagi organisasi atau dengan bahasa yang lebih sederhana. Dengan demikian munculnya inovasi adalah buah motivasi yang ada. *Steward* yang bertindak secara profesional akan menciptakan taraf pengorbanan personal tertentu dan berperilaku jujur serta tekun (Wignall, 2016). *Steward* mencoba berinovasi dengan menggunakan mekanisme pelaporan keuangan dari organisasi lain yang dinilai lebih akuntabel. Cara ini merupakan suatu strategi yang sesuai, karena pengurus gereja memiliki pola pelaporan keuangan yang belum sesuai standar atau pedoman akuntansi yang ada selama ini. Dengan demikian pedoman sistem pelaporan keuangan ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pengelola dalam upaya penyusunan laporan keuangan (Kaluvilla, 2013; Yahanpath et al., 2018). Dorongan inovasi ini juga didukung oleh penelitian Keay (2017), bahwa *steward* akan berusaha untuk bertindak dengan benar. Dalam konteks ini, tindakan yang benar diwujudkan oleh *steward* dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi unsur relevan, andal, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan, sebagai implikasi dari pengadopsian sistem yang diinisiasi oleh *steward*.

Filosofi manajemen dalam praktik akuntabilitas keuangan gereja. Sebagai sebuah lembaga keagamaan Kristen, gereja mendasarkan aktivitasnya pada Alkitab yang diyakini sebagai pedoman hidup dan tata laku. Di samping itu, sebagai lembaga keagamaan yang sakral, gereja juga menjunjung moralitas yang tinggi (Beales, 2021; Wibowo & Kristanto, 2018). Baik spiritualitas maupun moralitas sama-sama mengarahkan individu pada kebaikan. Spiritualitas dan moralitas menjadi nilai yang dihayati dan dijunjung tinggi oleh seluruh umat sebagai bagian dari gereja. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *steward* tidak hanya menghayati dan menjunjung tinggi spiritualitas Alkitab dan moralitas, namun juga berkomitmen untuk menerapkannya. Komitmen menunjukkan keyakinan dan sambutan *steward* terhadap nilai organisasi (Keay, 2017). Pengelola sebagai *steward* yang berkomitmen terhadap Alkitab sebagai nilai organisasi yang memiliki keselarasan dengan organisasi ataupun jemaat sebagai prinsipal, karena memiliki kesamaan visi,

misi, dan nilai. Hal ini akan memacu *steward* untuk mengerahkan kemampuannya se-optimal mungkin demi tercapainya keberhasilan organisasi. Sehubungan dengan peran *steward* sebagai pengelola keuangan, konsep ini memberikan gambaran bahwa komitmen terhadap nilai organisasi akan memotivasi *steward* untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuannya untuk menghadirkan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal yang sesuai, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang tercermin dalam laporan keuangannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya motivasi dalam melayani Tuhan dan sesama mendorong untuk melakukan inovasi dalam pelayanan. Hasil ini didukung juga dengan filosofi manajemen yang dianut dalam pengelolaan gereja, yaitu iman Kristiani. Nilai kristiani dalam Alkitab merupakan dasar semangat pelayanan yang mendorong para pengurus gereja untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik, tidak hanya untuk manusia, namun terutama untuk Tuhan (Teah et al., 2014; Yasmin et al., 2014). Dalam konteks ini, penerapan akuntabilitas keuangan dipandang sebagai upaya untuk dapat mengelola keuangan organisasi gereja dengan lebih baik. Praktik pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dipandang sebagai praktik yang lebih baik dalam pelayanan pengelolaan keuangan gereja. Walaupun demikian, kendala teknis terkait dengan laporan keuangan secara akuntansi masih merupakan penghambat praktik akuntabilitas keuangan (Sadornil et al., 2017). Kendala ini lebih disebabkan karena beragamnya latar belakang pendidikan para pekerja dan belum adanya standar laporan keuangan gereja. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pengurus gereja memiliki modal dasar yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan gereja, yaitu motivasi dan nilai filosofi manajemen (Purbiyati & Setyawati, 2020).

Akulturası budaya dan iman dalam perwujudan akuntabilitas keuangan gereja. Walaupun berada di Pontianak, gereja tersebut dijadikan sebagai tempat komunitas Batak di Pontianak menggunakan nilai budaya Batak dalam ibadah dan kegiatan gereja. Dukungan terhadap praktik akuntabilitas keuangan juga diperoleh dari filosofi budaya Batak. Dua faktor budaya Batak yang mendukung praktik akuntabilitas keuangan adalah budaya gotong royong dan keterbu-

kaan (rapat *huria*). Budaya gotong royong mendorong terbentuknya kolaborasi dan rasa saling mendukung. Makna gotong royong sendiri mengandung kesadaran dan kerelaan untuk mencapai tujuan bersama (Craig et al., 2012; Mutch, 2016). Secara umum, nilai gotong royong dalam budaya Batak dikenal dengan istilah “Dokdok rap manuhuk, neang rap manea”, dengan makna yang tidak jauh berbeda dengan budaya atau adat istiadat suku lain di Indonesia. Nilai tersebut menekankan bahwa kepentingan bersama perlu didahulukan dan diperjuangkan bersama. Hal ini selaras dengan praktik akuntabilitas keuangan yang efektif membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang ada dalam organisasi (Sanchez-Matamoros & Funnell, 2015).

Struktur pelayanan dan pemrosesan aktivitas keuangan pada gereja tersebut mencerminkan nilai kolaborasi secara nyata sebagai wujud nilai budaya gotong royong dalam budaya Batak. Dalam proses aktivitas keuangan, terlihat kolaborasi antara pimpinan jemaat, majelis perbendaharaan, bendahara gereja, pengguna dana, hingga badan audit berdasarkan fungsi dan otoritas masing-masing, seperti yang diatur secara umum oleh aturan sinode. Penolakan pihak tertentu terhadap proses akuntabilitas keuangan, akan menyebabkan tujuan dari pencapaian akuntabilitas keuangan organisasi sulit tercapai. Budaya Batak yang terkenal sangat terbuka, menjadi dukungan yang kuat untuk mewujudkan praktik akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas sendiri memiliki tuntutan keterbukaan dalam pertanggungjawaban kinerja atau keuangan organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya setempat memiliki nilai kearifan lokal sebagai bentuk akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, nilai budaya dapat mempengaruhi proses pelaksanaan praktik akuntabilitas keuangan dalam organisasi keagamaan (Melé & Fontrodona, 2017).

Kolaborasi juga tercipta antara *steward* dengan prinsipal yang diwujudkan dalam bentuk rapat “*huria*” yang mempertemukan mereka. Dalam rapat ini, baik *steward* maupun prinsipal memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan berkolaborasi demi memungkinkan mediasi untuk mewujudkan keselarasan tujuan. Dengan adanya kolaborasi, prinsipal dimungkinkan untuk dapat melakukan *check and balances*. Prinsipal dapat menilai pertanggungjawaban *steward*

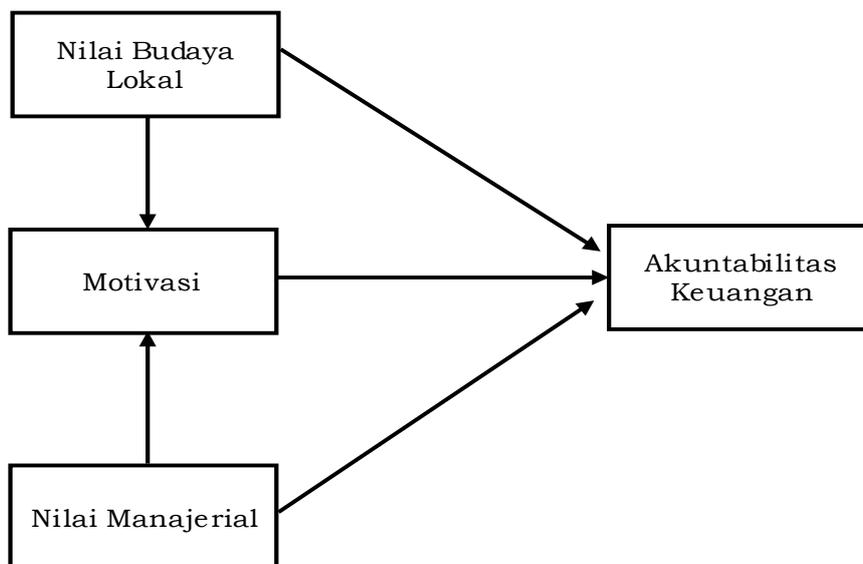
secara terbuka dan memberikan masukan-masukan yang terukur untuk mencapai kebaikan organisasi. Melalui *check and balances*, kepercayaan terhadap *steward* akan bertumbuh, karena kepercayaan terhadap *steward* akan terbangun melalui pemeriksaan, di mana pemeriksaan merupakan hal yang esensial dalam proses akuntansi (Petske, 2018; Stone & Erickson, 2017).

Selain nilai gotong royong, rapat atau pertemuan "*huria*" merupakan salah satu tradisi yang berkembang sebagai wujud akuntabilitas keuangan dan pengawasan di gereja. Pertemuan ini adalah bentuk tradisi keterbukaan, bahwa orang tidak segan melayangkan kritik dan bersedia menerima kritik. Temuan ini tidak sejalan dengan argumentasi Randa et al. (2011) dan Wibowo & Kristanto (2018) yang mengungkapkan bahwa Indonesia masih melekat pada budaya "*sungkan*" dalam membicarakan keuangan gereja. Padahal tradisi "*huria*" tersebut merupakan karakteristik masyarakat Batak. Iklim yang siap untuk mengkritik dan dikritik adalah hal yang menarik dalam praktik akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal (Heineck, 2017). Gereja harus semakin tumbuh dalam tradisi untuk memberi ruang yang sehat bagi kritik sekaligus tempat yang aman untuk belajar saling memberikan kritik (Bigoni et al., 2013). Kritik bagi organisasi keagamaan merupakan upaya nyata dalam usaha perbaikan bersama, dalam rangka menjaga keberlanjutan interaksi konstruktif dalam perwujudan fungsi-fungsi

pengelolaan publik (Kaluvilla, 2013). Kritik konstruktif adalah suatu refleksi bahwa keterlibatan umat sebagai prinsipal dalam mengawasi kinerja *steward* tersebut telah berjalan dengan baik (Adedibu & Igboin, 2019; Sanchez-Matamoros & Funnell, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal dapat mendorong kesadaran terhadap penerapan akuntabilitas keuangan. Nilai-nilai tradisi ini dirasakan lebih efektif dari pada peraturan formal yang tertulis. Dalam hal ini, akuntansi memiliki kecenderungan untuk menggunakan pendekatan formal sebagai jalan menciptakan akuntabilitas keuangan, termasuk pada organisasi keagamaan (Kaluvilla, 2013; Yahanpath et al., 2018). Akuntansi menawarkan metode pencatatan dan pengendalian yang sistematis. Kendati demikian, standar akuntansi juga masih memiliki keterbatasan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan praktik akuntabilitas keuangan perlu dimunculkan dari semangat internal organisasi tersebut. Secara keseluruhan, proses penerapan akuntabilitas keuangan pada gereja tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan bahwa proses penerapan akuntabilitas keuangan pada pengurus gereja didorong oleh nilai budaya lokal, motivasi, dan nilai manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dan nilai manajerial mendorong munculnya motivasi yang kuat pada para pengelola untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi gereja dan umat dalam rangka



Gambar 1. Prinsip Praktik akuntabilitas keuangan pada Organisasi Gereja Kristen

mewujudkan iman kepada Tuhan. Budaya kolaborasi dan keterbukaan dalam budaya Batak merupakan tradisi yang mendasari praktik manajerial sehingga mendorong motivasi untuk memberikan karya yang terbaik dalam pelayanan. Praktik ini mendorong pengelola untuk terbuka dalam penerapan berbagai pendekatan profesional yang dianggap sesuai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang dibutuhkan gereja Kristen, yang salah satunya adalah penerapan prinsip akuntabilitas keuangan. Hasil ini didukung dengan penjelasan dari teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pada dasarnya, para pengelola atau manajer memiliki motivasi dari dalam diri untuk dapat mengupayakan kinerja terbaik untuk organisasinya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semangat akuntabilitas pengelolaan keuangan telah terkandung dalam nilai budaya dan agama walaupun tidak terdefinisi secara jelas. Internalisasi nilai budaya dan agama pada kenyataannya dapat mendorong pelaksanaan prinsip akuntabilitas keuangan pada organisasi yang lebih efektif, yang dalam konteks penelitian ini adalah organisasi berbasis agama.

SIMPULAN

Organisasi keagamaan dapat mengadopsi budaya lokal yang menjadi latar belakang organisasi sebagai dasar penerapan praktik-praktik profesional yang berkembang saat ini. Internalisasi nilai budaya lokal yang dianut oleh organisasi akan dapat lebih diterima oleh anggota organisasi karena nilai-nilai tradisi tersebut telah hidup dan berkembang pada masyarakat setempat. Konsep budaya lokal lebih mudah untuk dipahami dari pada konsep profesional yang membutuhkan pemahaman akademis yang tinggi. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut lebih mudah diterima oleh anggota organisasi yang merupakan bagian dari kultur masyarakat tersebut. Apabila organisasi mampu menginterpertasikan dan mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam organisasi, maka praktik-praktik profesionalitas atau akuntabilitas keuangan dapat diimplementasikan secara efektif.

Gereja Kristen sebagai organisasi keagamaan dapat mengupayakan pengelolaan keuangan yang akuntabel walaupun belum didukung dengan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Penerapan prinsip pengelolaan yang akuntabel pada gereja Kristen dapat didukung dengan

budaya lokal Indonesia yang sesuai dengan karakteristik gereja setempat. Nilai budaya ini perlu dipertegas dalam rumusan yang lebih formal sebagai bentuk pengakuan unsur budaya yang melekat pada gereja Kristen. Organisasi gereja dapat menjadikan standar akuntansi nirlaba (ISAK 35) sebagai referensi untuk dapat memahami konteks pengelolaan keuangan lembaga nirlaba secara umum. Kendati demikian, gereja Kristen dapat menyusun pedoman pembukuan yang dirasa dapat mewakili nilai akuntabilitas keuangan yang diterima oleh segenap pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini dirasa lebih sesuai daripada memaksakan penggunaan standar akuntansi baku yang mungkin tidak mudah diterapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada segenap pengurus Gereja Kristen HKBP Pontianak dan LPPM UAJY.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedibu, B. A., & Igboin, B. O. (2019). Eschato-Praxis and Accountability: A Study of Neo-African Pentecostal Movement in the Light of Prosperity Gospel. *Verbum et Ecclesia*, 40(1), 1–9. <https://doi.org/10.4102/ve.v40i1.1987>
- Adhi, E., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), 105–136. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.104>
- Alsharari, N. M., & Al-Shboul, M. (2019). Evaluating Qualitative Research in Management Accounting Using the Criteria of “Convincingness”. *Pacific Accounting Review*, 31(1), 43–62. <https://doi.org/10.1108/PAR-03-2016-0031>
- Beales, K. (2021). Auditing Revival: George Whitefield and Public Accounting in Colonial America. *Church History*, 90(4), 824–846. <https://doi.org/10.1017/S0009640721002791>
- Bernstein, R., Buse, K. R., & Bilimoria, D. (2016). Revisiting Agency and Stewardship Theories Perspectives From Non-profit Board Chairs and CEOs. *Nonprofit Management and Leadership*, 26(4), 489–498. <https://doi.org/10.1002/nml.21199>
- Bigoni, M., Gagliardo, E. D., & Funnell, W. (2013). Rethinking the Sacred and

- Secular Divide: Accounting and Accountability Practices in the Diocese of Ferrara (1431-1457). *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(4), 567-594. <https://doi.org/10.1108/09513571311327462>
- Cecere, G., Guel, F. L., & Rochelandet, F. (2017). Crowdfunding and Social Influence: An Empirical Investigation. *Applied Economics*, 49(57), 5802-5813. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1343450>
- Craig, R., Taonui, R., & Wild, S. (2012). The Concept of Taonga in Māori Culture: Insights for Accounting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 25(6), 1025-1047. <https://doi.org/10.1108/09513571211250233>
- Cristian, M. O. (2020). What Kind of Transparency for the Church? Proposing Operational Transparency for Processes, Solutions and Decisions in the Catholic Church. *Church, Communication and Culture*, 5(2), 210-234. <https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1767508>
- Cui, J., Jo, H., & Velasquez, M. G. (2015). The Influence of Christian Religiosity on Managerial Decisions Concerning the Environment. *Journal of Business Ethics*, 132(1), 203-231. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2306-5>
- Dellaportas, S. (2019). The Role of Accounting in Mediating Empathic Care for the "Other". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(6), 1617-1635. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2017-2860>
- Funnell, W., & Williams, R. (2014). The Religious imperative of Cost Accounting in the Early Industrial Revolution. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 27(2), 357-381. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1269>
- Graham, C., & Grisard, C. (2019). Rich Man, Poor Man, Beggar Man, Thief: Accounting and the Stigma of Poverty. *Critical Perspectives on Accounting*, 59, 32-51. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.06.004>
- Heineck, G. (2017). Love Thy Neighbor – Religion and Prosociality. *International Journal of Social Economics*, 44(7), 869-883. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0258>
- Jeacle, I. (2012). Accounting and Popular Culture: Framing a Research Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25(4), 580-601. <https://doi.org/10.1108/09513571211225051>
- Kaluvilla, B. B. (2013). Understanding Accounting in Christian Organisations and the Influence of Culture on Accounting Practices: A Literature Review. *Ushus Journal of Business Management*, 12(1), 1-16. <https://doi.org/10.12725/ujbm.22.1>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Keay, A. (2017). Stewardship Theory: Is Board Accountability Necessary? *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1292-1314. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Magliacani, M., & Pietra, R. D. (2019). Power Relations and the Accounting System in the Archbishop's Seminary of Siena (1666-1690): When Local Power Resists Central Power. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(2), 401-420. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2015-1987>
- Marini, L., Andrew, J., & Laan, S. V. D. (2018). Accountability Practices in Microfinance: Cultural Translation and the Role of Intermediaries. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(7), 1904-1931. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2017-3028>
- McPhail, K., & Cordery, C. J. (2019). Theological Perspectives on Accounting: Worldviews Don't Change Overnight. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2330-2352. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2018-3415>
- Melé, D., & Fontrodona, J. (2017). Christian Ethics and Spirituality in Leading Business Organizations: Editorial Introduction. *Journal of Business Ethics*, 145(4), 671-679. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3323-3>
- Muller, R. (2015). Incarnation Theology versus the Sacralisation of Authority. *Theological Studies*, 71(3), 1-9. <https://doi.org/10.4102/hts.v71i3.2707>
- Mutch, A. (2016). Religion and Accounting Texts in Eighteenth Century Scotland:

- Organizational Practices and a Culture of Accountability. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 29(6), 926-946. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2014-1753>
- Parker, L. D., & Northcott, D. (2016). Qualitative Generalising in Accounting Research: Concepts and Strategies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 29(6), 1100-1131. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2026>
- Patty, A. C., & Irianto, G. (2013). Akuntabilitas Perpuluhan Gereja. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 177-187. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7191>
- Petzke, M. (2018). The global "Bookkeeping" of Souls: Quantification and Nineteenth-Century Evangelical Missions. *Social Science History*, 42(2), 183-211. <https://doi.org/10.1017/ssh.2017.50>
- Prado-Lorenzo, J. M., García-Salineró, R., & González-Bravo, M. I. (2017). Operational and Accounting Regulations in Spanish Municipal Pósitos. *Accounting History Review*, 27(1), 27-72. <https://doi.org/10.1080/21552851.2016.1192048>
- Purbiyati, Y. S., & Setyawati, V. D. (2020). Implementasi Spiritualitas Manajemen Keuangan pada Pengelolaan Keuangan Gereja Katolik. *Syntax Idea*, 2(11), 981-997. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i11.661>
- Randa, F., Triuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E. G. (2011). Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 35-51. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7109>
- Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan Social Entrepreneur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 135-155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10008>
- Sadornil, L. M., Moreno, M. B. P., & Arroyo, A. S. (2017). The Role of the Monastic Accounting throughout History in the Christian World: A Review. *Spanish Accounting Review*, 20(2), 143-156. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2016.10.003>
- Sanchez-Matamoros, J. B., & Funnell, W. (2015). War or the business of God: Sacred Mission, Accounting and Spanish Military Hospitals in the 18th Century. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 28(3), 434-459. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2014-1588>
- Santoso, G., & Soeherman, B. (2021). Leanovation sebagai Revolusi Akuntansi Manajemen pada Sistem Crowdfunding. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 329-350. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.19>
- Segal, L., & Lehrer, M. (2012). The Institutionalization of Stewardship: Theory, Propositions, and Insights from Change in the Edmonton Public Schools. *Organization Studies*, 33(2), 169-201. <https://doi.org/10.1177/0170840611433994>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons, Ltd.
- Senander, A. (2017). Beyond Scandal: Creating a Culture of Accountability in the Catholic Church. *Journal of Business Ethics*, 146(4), 859-867. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3217-4>
- Shaharuddina, S. B., & Sulaiman, M. B. (2015). Financial Disclosure and Budgetary Practices of Religious Organization: A Study of Qaryah Mosques in Kuala Terengganu. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 17(1), 83-101. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.6151>
- Stone, M. F., & Erickson, S. L. (2017). Hometown Community Church: Opportunities and Challenges of Continued Growth. *Issues in Accounting Education*, 32(3), 129-136. <https://doi.org/10.2308/iace-51773>
- Styhre, A. (2014). In the Service of God and the Parish: Professional Ideologies and Managerial Control in the Church of Sweden. *Culture and Organization*, 20(4), 307-329. <https://doi.org/10.1080/14759551.2013.795151>
- Tanasal, S., Randa, F., & Ng, S. (2019). Akuntabilitas Berbasis Mettā dan Kamma. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 448-467. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.26>
- Teah, M., Lwin, M., & Cheah, I. (2014). Moderating Role of Religious Beliefs on Attitudes towards Charities and Motivation to Donate. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 26(5),

738–760. <https://doi.org/10.1108/APJML-09-2014-0141>

- Wibowo, E. K. A. A., & Kristanto, H. (2018). Persepsi Anggota Gereja atas Pengendalian Internal. *Gema Teologika*, 3(1), 53–70. <https://doi.org/10.21460/gema.2018.31.348>
- Wignall, R. (2016). 'A Man after God's Own Heart': Charisma, Masculinity and Leadership at a Charismatic Church in Brighton and Hove, UK. *Religion*, 46(3), 389–411. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2016.1169452>
- Yahanpath, N., Pacheco, P., & Burns, E. A. (2018). Discussing a Balanced Scorecard for One Local Independent New Zealand Church. *Journal of Management, Spirituality and Religion*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14766086.2017.1338612>
- Yasmin, S., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2014). Communicated Accountability by Faith-Based Charity Organisations. *Journal of Business Ethics*, 122(1), 103–123. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1759-2>